BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Yang menyebabkan hancurnya Perekonomian Indonesia, ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dollar dan inflasi yang sangat tinggi. Pada sisi Perbankan, krisis kepercayaan nasabah terhadap bank menyebabkan penarikan dana secara besarbesaran maka bank akan mengalami kebangkrutan dan ketidakmampuan bank dalam memenuhi penarikan nasabahnya. Permodalan Bank yang terus melemah dan berkurangnya likuiditas bank menjadi faktor runtuhnya sistem Perbankan di Indonesia.

Krisis Moneter tahun 1998 menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan Pakto 88. Pengusaha dapat mendirikan Bank dengan modal 1 Milyar. Dengan adanya Kebijakan Pakto 88 diharapkan mampu mengatasi gejolak financial Perbankan Di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Pakto 88 mulai menampakkan dampak negative berupa kebebasan Bank dalam permberian kredit. Rendahnya manajemen bank menyebabkan arus permodalan Bank menjadi tidak terkendali serta likuiditas yang rendah sehingga bank mengalami keruntuhan.

Kebebasan bank tersebut menyebabkan para pengusaha kehilangan akses pembiayaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja berpotensi meningkatnya kredit non lancar. Pengangguran yang tinggi menyebabkan kriminalitas yang tinggi pula. Naiknya harga kebutuhan pokok semakin mempersulit kondisi masyarakat miskin. Kemudian, pada sisi sektor riil menurunnya permintaan ekspor dan turunnya harga komoditas memunculkan resiko kredit. Dampak krisis dari sektor riil akan mempengaruhi perbankan dalam penyaluran kredit yang akan berimbas pada pembiayaan bisnis. Dalam hal ini Pemerintah gagal dalam menjaga stabilitas keuangan.

Menurut Prodjokdikoro (1991), Korporasi merupakan suatu kumpulan orang. Dalam korporasi tersebut biasanya yang mempunyai kepentingan yaitu orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, setiap anggota mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Ketahanan ekonomi (economic resilience) adalah kemampuan suatu perekonomian, yang didukung oleh kebijakan, untuk menahan atau pulih dari dampak suatu guncangan yang kuat. Sedangkan, Kerentanan ekonomi (economic vulnerability) didefiniskan sebagai eksposur suatu perekonomi-an terhadap guncangan yang bersifat eksogen, yang muncul dari karakter inheren perekonomian itu. Sedangkan, Definisi ini diberikan oleh Briguglio et all (2009) dalam makalahnya, yakni "Economic Vulnerability and Resilience Concepts and

Measurements", yang dimuat di WIDER Research Paper pada Mei 2008. Pembedaan dua aspek ini penting karena suatu perekonomian bisa memiliki kerentanan yang tinggi, namun kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya membuatnya memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi guncangan dari luar. Sebaliknya, kebijakan yang salah bisa membuat suatu perekonomian memiliki ketahanan yang buruk dalam menghadapi guncangan eksternal, meski secara inheren perekonomian itu sebenarnya tidak rentan. Perbedaan dua aspek ini membuat pemetaan tingkat kerentanan dan ketahanan suatu perekonomian menjadi penting, karena hal ini bisa menunjukkan risiko yang dihadapi jika terjadi guncangan dari luar. (LPS: Analisis Stabilitas Sistem Keuangan, 2012).

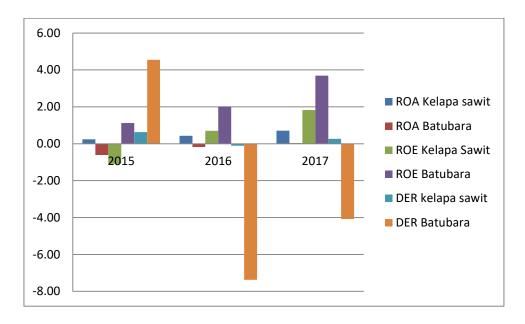
Menurut Briguglio (2009), dalam penelitiannya berpendapat bahwa "Economic resilience is used to refer to the ability to recover from or adjust to the negative impacts of external economic shocks."

Ketahanan korporasi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menahan guncangan dari luar atau *eksternal shocks*. Disisi lain, ketika sebuah korporasi mendapat tekanan dari luar, perusahaan tetap bisa beroperasi. Ketahanan dibentuk melalui kebijakan moneter yang disusun oleh Bank Indonesia, seperti kebijakan suku bunga, inflasi, kurs. Kebijakan tersebut sebagai suatu langkah untuk mencegah terjadinya kerentanan ekonomi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Gejolak *financial* yang terjadi pada tahun 1998 mempengaruhi kinerja korporasi di Indonesia. Melemahnya permintaan domestik akan berdampak pada kinerja korporasi. Kerentanan korporasi yang terjadi mempengaruhi kinerja pada sector keuangan. Kerentanan berasal dari hutang luar negeri yang semakin membesar. Salah satu faktor eksternal dari kerentanan korporasi yaitu perlambatan perekonomian dunia yang berdampak pada penurunan harga komoditas mengakibatkan pelemahan kinerja ekspor Indonesia. Hal ini meningkatkan NPL karena resiko kredit yang tinggi dan beresiko pada kemampuan eksportir dalam pengembalikan utang kepada bank. Kemudian pada sisi internal yaitu meningkatnya tekanan inflasi yang didorong oleh kenaikan harga pangan dan bbm. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih dominan didukung oleh konsumsi rumah tangga. Kedua faktor tersebut berpotensi meningkatkan resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Perekonomian global yang belum pulih memberi tantangan bagi perekonomian Indonesia karena dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. Risiko ini, bila terus berlanjut, tidak hanya menghambat perbaikan pertumbuhan, namun juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Hubungan keduanya saling timbal balik dan berpotensi membentuk lingkaran yang buruk (vicious circle). (Bank Indonesia, 2016).

Kerentanan korporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari sisi perbankan, korporasi rentan karena manajemen bank yang rendah sehingga para pengusaha melakukan pinjaman kredit ke luar negeri kemudian terjadi kekurangan likuiditas yang mengakibatkan kredit macet. likuiditas yang rendah menyebabkan kinerja keuangan bank runtuh seperti pada saat krisis moneter. Dari sisi internal, sistem keuangan menghadapi beberapa tantangan antara lain adanya potensi kenaikan inflasi dari *administered price* serta upaya peningkatan penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak untuk mengendalikan defisit (Bank Indonesia, 2017). Dari sektor rill, ekspor komoditas primer menurun, dikarenakan pemasukan eksportir menurun karena anjloknya harga komoditas. Dampak krisis perdagangan antar Negara pun menyebar. Indonesia masih bergantung kepada Negara lain seperti ekspor. Ketika krisis terjadi, guncangan dari Negara lain seperti harga komoditas yang anjlok mempengaruhi pemasukan yang berakibat pada melemahnya cadangan devisa. Ini merupakan guncangan yang sangat serius karena ekpor merupakan peran utama dalam perekonomian Indonesia.



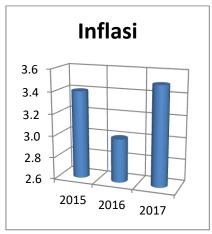
Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah dengan Microsoft Excel 50

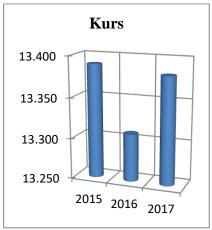
Perusahaan Non Financial Go Public.

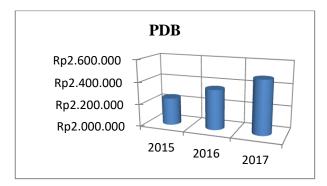
Gambar 1.1 Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Komoditas Utama

Kondisi korporasi pada non keuangan di Indonesia saat ini tumbuh melambat tetapi kinerja ekspor terdorong oleh kinerja perekonomian global. kinerja korporasi di sektor komoditas utama cukup bervariasi. Dari 3 komoditas yakni kelapa sawit dan batubara, hanya kelapa sawit yang menunjukkan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja ini disebabkan oleh kenaikan harga sepanjang 2016. Rendahnya nilai *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) korporasi di sektor batubara diiringi dengan kenaikan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) menyebabkan tingkat kerentanan korporasi di sektor tersebut meningkat terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan *Debt to Equity Ratio* (DER) tersebut perlu dimonitor di tengah penurunan profitabilitas

dan produktivitas korporasi karena dapat berdampak pada kemampuan membayar kewajibannya (Bank Indonesia, 2017).







Sumber: Bank Dunia, BPS, Bank Indonesia

Gambar 1.2 Indikator Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia

Pada tahun 2015 perkekonomian Indonesia mengalami perlambatan karena efek dari perlambataaan ekonomi di Negara Tiongkok. Efeknya berupa penurunan harga komoditas. Negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satunya terkena dampak atas turunnya harga komositas dan berkurangnya volume permintaan. Kinerja ekspor di Indonesia mengalami tekanan.

menurunnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi berdampak pada inflasi di Indonesia. Pada tahun 2015, laju inflasi tinggi sebesar 3,4%. Hal tersebut berdampak pada pendapatan Negara yang mengalami penurunan. Terlihat pada gambar diatas bahwa pada tahun 2015 PDB mengalami perburukan.

Perekonomian global yang belum pulih serta berjalan dengan lambat, belum merata disertai dengan perbedaan arah kebijakan moneter di Negara maju menjadi fokus perhatian fora kerja sama internasional. Fora juga mencermati sejumlah tantangan, antara lain tren normalisasi kebijakan moneter AS, pelemahan perekonomian Tiongkok, penguatan dolar AS dan penurunan harga komoditas global serta berkurangnya impor. Kondisi tersebut direspons dengan penguatan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun ketahanan kawasan (Bank Indonesia, 2015).

Untuk mengukur ketahanan korporasi yaitu menggunakan *composite index*. *Composite index* digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui sumber tekanan yang terjadi pada indikator-indikator yang menyebabkan kerentanan korporasi. Tujuan indeksasi tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan *composite index*, langkah selanjutnya yaitu dengan meregresi menggunakan metode pendekatan regresi linear berganda.

Tujuan dilakukannya regresi adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel makro berpengaruh terhadap indeks komposit (indeks ketahanan korporasi).

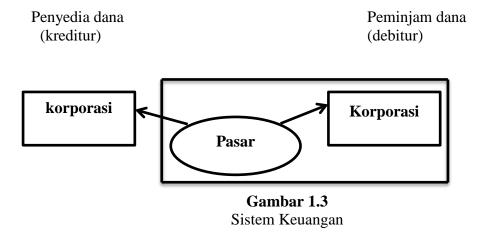
Untuk variabel internalnya dalam composite index (indeks ketahanan korporasi) menggunakan variabel Return On Asset (ROA) Minyak kelapa Sawit, Return On Asset (ROA) Batubara, Return On Equity (ROE) Minyak Kelapa sawit, Return On Equity (ROE) batubara, Debt to Equity Ratio (DER) Minyak Kelapa Sawit. Debt to Equity Ratio (DER) Batubara dan variabel eksternal dalam Composite Index (indeks ketahanan korporasi) menggunakan variabel makro berupa inflasi, nilai tukar (kurs) dan produk Domestik Bruto (PDB). Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan terkait dengan keuntungan untuk mengukur kekuatan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat pendapatan aset dan saham. Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio dan mengukur tingkat hutang total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada mekanisme pasar. Nilai tukar atau kurs adalah nilai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dan sebagai pembanding mata uang suatu Negara dengan Negara lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi disuatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) digunakan untuk mengukur pendapatan suatu Negara dan sebagai

struktur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel yang digunakan untuk regresi yaitu menggunakan variabel Product Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Kurs.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan sektor korporasi di Indonesia. Untuk itu penulis menyusun penenlitian yang berjudul: "Analisis Ketahanan Sektor Korporasi di Indonesia"

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk memperjelas dan membatasi masalah, menghindari permasalahan yang melebar dari apa yang telah disebutkan pada latar belakang maka batasan masalah sebagai berikut:



Pada gambar 1.3 menjelaskan bahwa arus aliran dana terjadi ketika pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*) sehingga memerlukan perantara, yaitu bank. Bank bekerja sebagai penghimpun dan menyalurkan dana. Perekonomian yang baik ketika arus aliran dana lancar. Pada kondisi ini, tingkat bunga relative rendah, sehingga meminjam dana menjadi lebih mudah. Semantara itu, pada saat perekonomian menurun, kemampuan masyarakat untuk pengembalian kredit pun terhambat sehingga kinerja kreditpun memburuk. Bank mengalami kerugian jika NPL meningkat karena untuk menutup kerugian sehingga akan berdampak pada menurunnya harga dan meningkatnya resiko sistemik. Penurunan harga mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga memicu terjadinya instabilitas sistem keuangan.

Dalam kebijakan makroprudensial, kondisi korporasi baik sebagai surplus maupun defisit unit dalam sistem keuangan, ikut menentukan keberlangsungan institusi keuangan sehingga perlu dipantau. Sebagai depositor dalam perbankan serta investor di pasar keuangan, korporasi merupakan sumber pendanaan dalam sistem keuangan. Sedangkan debitur perbankan dan institusi keuangan non bank, kondisi keuangan korporasi juga ikut menentukan kinerja dan tingkat kesehatan institusi keuangan.

Kondisi pasar keuangan sebagai tempat para investor bertemu dan melakukan perdagangan asset keuangan juga menjadi penting dipantau, karena informasi di pasar keuangan mencerminkan perilaku dan kinerja sektor keuangan (Bank Indonesia, 2016). Ketika terjadi guncangan apakah korporasi tahan dengan adanya tekanan dari luar. Maka dari itu, setiap elemen penting untuk dimonitor karena rentan terhadap tekanan dan resiko dapat di nilai dari hasil pemantauan. Jika tidak dipantau atau tidak segera dimitigasi maka setiap elemen sistem keuangan memiliki potensi resiko sistemik yang menyebabkan kerentanan pada sistem keuangan khususnya korporasi.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana mengukur ketahanan korporasi di Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap ketahanan korporasi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui ketahanan korporasi di Indonesia.
- Untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap ketahanan korporasi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi perusahaan dalam menganalisis korporasi di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian empiris tentang analisis ketahanan sektor korporasi di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang ketahanan korporasi di Indonesia.